

NASIONAL

KSP Listyo Sigit Siap Jalankan
Arahan Khusus Prabowo Kawal
Program Prioritas

Halaman 2

POLITIK

Rapor Merah 2 Tahun
Prabowo-Gibran, Aliansi BEM
Lintas Kampus Turun ke Jalan

Halaman 4

HARIAN

MERDEKA

SELASA, 20 OKTOBER 2026

RAKYAT

Rp. 15.000 | TERBIT SORE

www.harian-merdeka.com



Polri Mulai Serius Usut 98 Kasus Karhutla Korporasi

JAKARTA | HARIAN MERDEKA — Bareskrim Polri tengah mengusut 98 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi. Penegakan hukum ini dilakukan untuk menindak tegas perusahaan yang diduga lalai hingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara.

Halaman 11

KSP Listyo Sigit Siap Jalankan Arahan Khusus Prabowo Kawal Program Prioritas



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal program prioritas nasional.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan arahan itu disampaikan langsung Presiden kepada KSP di Istana Merdeka, pada Senin (19/10). Teddy menyebut dalam pertemuan tersebut Sigit turut melaporkan perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Sementara itu, kata dia, Presiden memberikan arahan agar langkah pengawasan dan pengendalian program dapat berjalan optimal.

“Presiden Prabowo memberi arahan terkait pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional serta penanganan berbagai isu strategis,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis.

Teddy mengatakan menjelang dua tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program strategis.

Oleh karenanya, Teddy menyebut, Presiden memerintahkan KSP untuk terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan tepat sasaran.

“Menjelang 2 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menginstruksikan KSP untuk terus mengawal pelaksanaan program strategis agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Terpisah, Sigit memastikan pihaknya siap menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut.

Khususnya, kata dia, terkait pengawasan program prioritas nasional maupun isu strategis lainnya. ● (Egi)

Menko Polkam dan Mendes Yandri Bersinergi Rampungkan Berbagai Persoalan Desa

JAKARTA |
Harian Merdeka

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyoroti sejumlah persoalan di desa, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang belum beroperasi, hingga sengketa lahan. Pemerintah mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menangani berbagai persoalan tersebut.

Persoalan itu disampaikan Yandri dalam Rapat Koordinasi Membahas Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Menurut Yandri, penanganan karhutla membutuhkan strategi yang tepat dan pendekatan khusus kepada masyarakat desa. Sebab, titik kebakaran banyak ditemukan di wilayah perdesaan sehingga penanganannya perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat.

“Saya kira karena ini ada di desa berkaitan dengan masyarakat desa maka perlu pendekatan secara khusus agar tidak ada kesalahpahaman,” tutur Mendes Yandri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jakarta, Senin 19 Oktober 2026.



Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang memiliki tugas, fungsi, serta keahlian terkait penanganan karhutla. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak asap sehingga masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih dan beraktivitas dengan nyaman.

Karhutla dan sebaran titik panas dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Sumatera Selatan. Dampak asap juga menjangkau wilayah lain, termasuk Jakarta, yang terdeteksi mengalami penurunan kualitas udara pada Jumat sebelumnya.

Selain karhutla, Yandri menyoroti KDKMP yang belum beroperasi serta sengketa lahan desa yang berpotensi memicu konflik antarwarga, menghambat pembangunan,

dan menimbulkan kerugian ekonomi.

Persoalan tersebut memerlukan koordinasi dan penyelesaian yang tepat agar tidak berlarut-larut serta menghambat kemajuan desa.

Yandri juga menyinggung keberadaan pos bantuan hukum (posban-kum), hasil kerja sama dengan Kementerian Hukum. Program ini bertujuan membantu masyarakat desa menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi.

Di sisi lain, asosiasi desa dinilai memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun komunikasi dan mempercepat pembangunan desa.

Sejumlah asosiasi yang disebut meliputi PAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPD, APDESI, DPN PPD, PABPDSI, ABPDESNAS, KOMPAKDESI, AKSI, dan GEMA Desa. ● (Egi)

Redaksi MERDEKA

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiho Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Elektabilitas Anjlok di Dua Tahun Prabowo, Istana Klaim Kepuasan Publik Masih 65%

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Muncul isu perpecahan menyusul ketidakpuasan publik terhadap dua tahun masa pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Krisis legitimasi yang terus memburuk tidak lagi sekadar berdampak pada anjloknya elektabilitas sang penguasa, melainkan mulai memantik opini-opini ekstrem di berbagai daerah yang mengancam integritas nasional.

Pengamat Politik dan Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menangkap adanya sinyal bahaya berupa wacana perpecahan yang dipicu oleh frustrasi massal terhadap pemerintah pusat.

“Saya takut, ya, opini-opini yang berkembang di daerah itu betul-betul terjadi. Indonesia

bubar, itu yang paling saya takut,” tegas Saiful dikutip Selasa (20/10/2026).

Ketakutan Saiful ini beralasan, mengingat survei yang dilakukan lembaga pada periode 1-10 Oktober 2026. Elektabilitas Prabowo hanya tersisa 9,8 persen, tertinggal jauh dari tokoh daerah seperti Dedi Mulyadi (35,5 persen).

Saiful menilai bahwa memaksakan diri memimpin negara tanpa dukungan sosiologis dan legitimasi moral yang memadai hanya akan mempercepat hancurnya kohesi sosial di tingkat akar rumput.

Meski menolak memberikan rekomendasi sepihak terkait cara mengakhiri krisis ini, ia mendesak para elite di pemerintahan untuk segera membuka mata dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan mandat rakyat. Ia pun memberikan sinyalemen bahwa instrumen



konstitusional di parlemen adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan krisis ketatanegaraan tanpa pertumpahan darah. “Setidak-tidaknya sadarlalah bahwa Anda itu sudah tidak legitimate, sebenarnya, untuk

berkuasa sekarang ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan segera ada jalan keluar untuk ini, apa pun itu. Kalau mau jalan secara damai adalah lewat DPR,” tuturnya.

Di sisi lain, kubu pemerintah dengan sigap menangkis isu krisis legitimasi yang dikaitkan dengan ancaman bubarnya negara tersebut.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan tampil membela stabilitas pemerintahan saat ini dengan menyodorkan narasi tandingan yang berbasis pada data lembaga survei lain. Ia memandang temuan yang bernada pesimis tersebut bukanlah satu-satunya potret kebangsaan saat ini.

“Di Poltracking hari ini juga hampir 60 persen kalau enggak salah saya, yang masih ada keyakinan publik terhadap Presiden Prabowo,” ujar Syahganda. ● (Egi)

Jokowi Sebut Isu Ijazah Dirinya dan Gibran sebagai Operasi Politik, Singgung Dukungan Pilpres 2029



SOLO | **Harian Merdeka**

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menyinggung isu ijazah yang menyeret namanya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi menduga isu tersebut berkaitan dengan operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi seseorang.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi di kediamannya di Sum-

ber, Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (16/10/2026). Ia merespons isu yang kembali berkembang dan menjadi perbincangan publik belakangan ini.

“Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penunggang gelap yang menunggangi lagi. Jadi, menjadi ramai sekarang,” kata Jokowi dalam sebuah video yang beredar luas.

Menurut Jokowi, isu ijazah yang kembali mencuat tidak bisa

dilepaskan dari dugaan adanya kepentingan politik tertentu. Ia menilai, persoalan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menjatuhkan reputasi politik seseorang.

“Bisa saja memang saya dioperasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” imbuhnya.

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan isu tersebut. Ia menilai situasi yang berkembang merupakan bagian dari dinamika politik yang belakangan kembali menghangat.

Jokowi Soroti Sikap Partai Politik terhadap Gibran

Selain menyinggung persoalan ijazah, Jokowi turut menyoroti sikap sejumlah partai politik terkait kemungkinan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Jokowi menyinggung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan

Partai Golkar yang dinilainya belum menyampaikan dukungan secara tegas kepada Gibran.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keputusan untuk memberikan dukungan politik merupakan kewenangan masing-masing partai.

Menurut Jokowi, setiap partai memiliki hak untuk menentukan sikap dan arah politiknya sendiri. Karena itu, ia mengaku tidak ingin mencampuri urusan internal partai politik.

Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa peta dukungan menuju Pilpres 2029 masih menjadi bagian dari dinamika politik yang terus berkembang.

Isu Ijazah Gibran Kembali Menjadi Sorotan

Sebelumnya, isu mengenai ijazah Gibran kembali mencuat setelah Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengajukan perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). ● (Agus)

Rapor Merah 2 Tahun Prabowo-Gibran, Aliansi BEM Lintas Kampus Turun ke Jalan



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) berencana menggelar demonstrasi di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan keterangan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Imawan, aksi mahasiswa di Jakarta dijadwalkan berlangsung di dua lokasi, yakni Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Aksi simbolik di Tugu Proklamasi direncanakan dimulai pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, demonstrasi dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.

Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.

Meski tergabung dalam aliansi yang sama, tidak semua kampus akan mengirimkan peserta aksi ke Jakarta. Sebagian mahasiswa dijadwalkan menyampaikan aspirasi di

daerah masing-masing.

Yatalathof menjelaskan, BEM UI akan mengikuti aksi di Jakarta, sedangkan sejumlah kelompok mahasiswa lainnya menggelar demonstrasi secara lokal sebelum merencanakan gerakan bersama dalam skala lebih besar.

Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan dasar.

Berikut lima tuntutan yang disampaikan Komite Sadar:

1. Penanganan kebakaran hutan dan banjir sebagai bencana nasional

Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga menuntut pemulihan kesehatan masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab, termasuk pencabutan izin perusahaan terkait.

2. Perbaikan kebijakan ekonomi

Mahasiswa meminta pemerintah membenahi tata ke-

lola ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian yang mereka soroti, termasuk kenaikan beban pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Penghentian pembatasan kebebasan berpendapat

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan praktik pembatasan kebebasan berpendapat yang mereka nilai menjadi persoalan dalam kehidupan demokrasi.

4. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Mahasiswa juga mendesak penanganan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menyoroti persoalan korupsi serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan sebagai bagian dari masalah tata kelola pemerintahan.

5. Penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik

Komite Sadar menuntut agar biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan publik yang membebani masyarakat dapat ditekan. Mahasiswa juga meminta akses terhadap layanan tersebut tersedia secara lebih merata.

Survei terhadap 560 Responden Jadi Dasar Aspirasi Mahasiswa

Sebelum merencanakan demonstrasi, Komite Sadar menghimpun pandangan masyarakat melalui survei yang melibatkan 560 responden dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.

Menurut Yatalathof Imawan, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan belum berjalan secara maksimal.

Sejumlah isu yang muncul

dalam survei meliputi harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi, kebakaran hutan, biaya pendidikan, serta persoalan ekonomi dan keuangan.

Temuan tersebut menjadi salah satu landasan bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang mereka anggap membutuhkan perhatian pemerintah.

Namun, hasil survei itu merupakan gambaran dari responden yang dihimpun Komite Sadar. Tanpa informasi lebih lanjut mengenai metode pengambilan sampel dan pembobotan, hasilnya tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia.

Mahasiswa Soroti Kedaulatan Rakyat pada Dua Tahun Pemerintahan

Pemilihan tanggal 20 Oktober sebagai waktu demonstrasi berkaitan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yatalathof menegaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai evaluasi perjalanan pemerintahan, tetapi juga sebagai penyampaian kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang mereka lihat di tengah masyarakat.

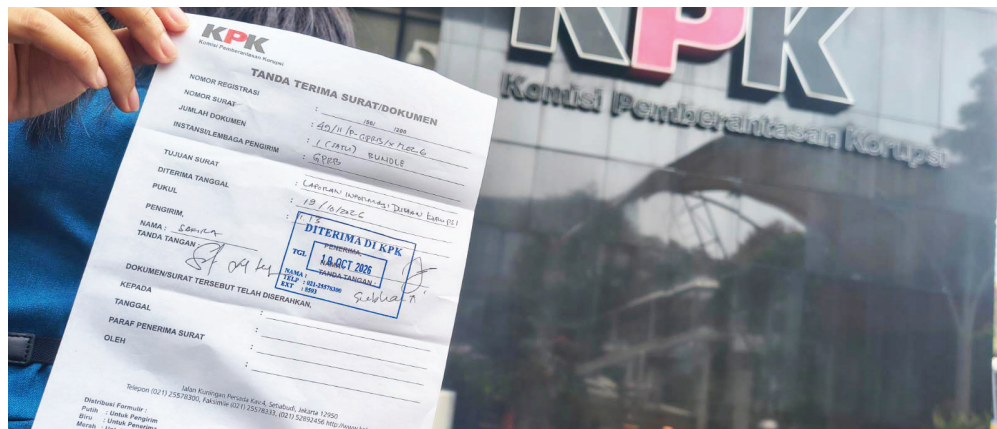
Menurut dia, tuntutan mengenai kedaulatan rakyat berkaitan dengan kondisi demokrasi, penegakan hukum, persoalan lingkungan, serta masalah sosial dan ekonomi di berbagai daerah.

Melalui demonstrasi ini, mahasiswa berharap persoalan yang mereka angkat mendapat perhatian dan tanggapan serius dari pemerintah.

Lima tuntutan Komite Sadar tersebut mencerminkan sejumlah isu yang menjadi fokus gerakan mahasiswa dalam memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.

● (Egi)

Seret Anggota DPRD Jatim dan Bojonegoro, Kasus Dugaan Korupsi APBD Dilaporkan ke KPK



JAKARTA |
Harian Merdeka

Dua anggota DPRD berinisial SW dan SP diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/10/2026). Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

SW diketahui merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sedangkan SP merupakan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Selain menyampaikan pengaduan, pihak pelapor juga meminta KPK melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengaduan dugaan korupsi yang sebelumnya telah disampaikan ke Polda Jawa Timur.

Salah satu tim advokat dari ITSLaw, Safira Widyawati SH mewakili Achmad Shuhaeb mengatakan, kedatangan mereka ke Gedung Merah Putih KPK tidak hanya untuk menyampaikan pengaduan baru, tetapi juga mendorong pengawasan terhadap proses penanganan laporan di kepolisian.

“Jadi, selain membuat

pengaduan baru, kedatangan kami di Gedung Merah Putih juga untuk meminta agar KPK melakukan supervisi terhadap pengaduan rekan-rekan di Polda Jatim,” kata Safira.

Menurut Safira, langkah tersebut sejalan dengan perhatian terhadap penggunaan APBD agar benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Safira merujuk pada pesan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ataupun Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak yang mengingatkan pentingnya pemanfaatan anggaran daerah secara tepat sasaran.

Dalam pengauditan tersebut, pelapor menyoroti keterlibatan SP sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan SW di lingkungan DPRD Jawa Timur. Berdasarkan keterangan pelapor, sejak 2024 SW disebut kerap mengundang SP untuk mengisi kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Sebagai narasumber DPRD Jawa Timur, SP diketahui membuat dokumen riwayat hidup atau curriculum vitae (CV) yang digu-

nakan dalam proses pencairan anggaran kegiatan. Setelah ditelusuri, gelar akademik yang dicantumkan dalam CV tersebut diduga tidak sah atau tidak tercatat secara resmi dalam website Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Dugaan tersebut menjadi salah satu dasar pelaporan kepada KPK. Pelapor meminta agar dokumen dan informasi yang disampaikan ditelaah oleh pihak berwenang untuk memastikan keabsahan gelar akademik serta kesesuaiannya dengan administrasi kegiatan yang menggunakan anggaran daerah.

“Semua bukti penggunaan gelar akademik dan dokumen lain sudah kami serahkan ke KPK,” pungkas Safira.

Selain meminta KPK menelaah pengaduan terhadap SW dan SP, pihak pelapor berharap lembaga antirasuah tersebut melakukan supervisi dan monitoring atas laporan yang telah disampaikan ke Polda Jawa Timur.

Permintaan itu dimaksudkan untuk mendorong penanganan pengaduan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum. **● (Egi)**



Komisi II DPR RI Bakal Panggil KPU dan Bawaslu Soal Dugaan Pasal Selundupan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan komisinya akan memanggil KPU hingga Bawaslu terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat 3 di Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Pemanggilan KPU hingga Bawaslu menyusul usulan anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, mantan Ketua Komisi II DPR periode sebelumnya.

“Saya rasa semua usulan anggota kita masukkan dalam jadwal, memang ada rencana pemanggilan lembaga-lembaga tersebut,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Namun, Dede mengatakan saat ini DPR masih reses. Politikus Partai Demokrat itu menyampaikan untuk sementara pihaknya akan membahas data, catatan hingga rekaman mengenai dugaan pasal selundupan tersebut.

"Namun sesuai jadwal yang kita buat, karena sementara ini sedang reses. Jadi nanti kita bicara data saja yg ada di komisi baik catatan maupun rekamannya," ucap dia.

Dede memastikan semua usulan anggota Komisi II DPR akan diakomodasi. Jadi, kata dia, tidak ada lagi pasal-pasal yang diduga diselundupkan.

“Jadi masukan apapun akan kita dudukkan sebagai bahan RUU ke depan agar tidak terulang di kemudian hari,” ujar dia.

Sebelumnya, Doli mendorong polemik dugaan pasal selundupan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dibawa ke rapat Komisi II DPR. Menurutnnya, polemik ini dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya.

“Ya, saya kan sekarang masih di Komisi II dan dari awal kan waktu itu saya juga mengusulkan supaya konfirmasi soal pasal ini dibahas di RDP-RDP Komisi II. Namun waktu itu konteksnya saya mengatakan ini adalah bagian dari evaluasi kita karena sekarang kan kita sudah membentuk Panja revisi Undang-Undang Pemilu,” kata Doli saat konferensi pers, Minggu (18/10). ● **(Egi)**

Polda Metro Jaya Kembali Gerebek Kampung Boncos, Sita 7 Bong Sabu

JAKARTA |
Harian Merdeka

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar operasi di kawasan Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, Senin. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kembali terjadi di kawasan tersebut.

Operasi melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) itu melibatkan 101 personel gabungan dari berbagai instansi.

Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Bismo



Teguh Prakoso mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan kawasan yang telah ditangani tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa.

“Pemberantasan narkotika harus berjalan bersama dengan pemulihan kawasan. Kami melakukan pemeriksaan dan penindakan secara terukur terhadap setiap indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, sekaligus mendorong agar lingkungan tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa,” ujar Bismo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Operasi diawali dengan apel gabungan di Pospol Lantas Tomang. Sebanyak 101 personel diterjunkan, terdiri atas anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya,

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Ditsamapta, Satbrimob, Bidpropam, Bid-dokkes, Bidhumas, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, POM TNI, serta Satpol PP DKI Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak mengamankan tersangka. Namun, sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika ditemukan di lokasi.

Barang-barang tersebut meliputi tujuh alat isap, 10 pipet, dua pak sedotan, 10 korek api, satu palu, dua gunting, dan empat cutter.

“Seluruh barang tersebut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Bismo.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan, upaya pencegahan narkotika

membutuhkan peran aktif masyarakat. Kepedulian warga dan informasi yang disampaikan kepada kepolisian dinilai penting untuk mengantisipasi munculnya kembali penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

“Kami mendorong penanganan narkotika tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan kepedulian terhadap lingkungan. Informasi dari masyarakat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika kembali muncul,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya mendorong pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat agar kawasan Kampung Boncos tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

● (Egi)

Cek SPBU di Malang, Kapolres Peringatkan Sanksi Tegas Penimbun BBM

MALANG |
Harian Merdeka

Polres Malang mengecek stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Malang, Minggu (18/10) malam. Hasilnya, Peralite tercatat tersedia di semua SPBU yang dicek.

Kapolres Malang AKBP Rulian Syaury mengatakan, pengecekan bersama Pemkab Malang dan Per-

tamina itu untuk mengantisipasi antrean panjang dan panic buying.

Di SPBU 54.651.11 Jalan Panglima Sudirman, Kepanjen, tercatat stok Peralite 5.000 liter, Solar 2.000 liter, Pertamina 2.000 liter, dan Pertamina Dex 1.400 liter.

Di Pakisaji, stok Peralite di SPBU Pepen 15.854 liter dan di SPBU Pakisaji 22.499 liter. Sementara di SPBU Genengan, stok Per-

talite 8.212 liter.

Rulian mengimbau warga membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak terpancing kepanikan. Pembelian berlebihan, kata dia, bisa memperpanjang antrean dan menghambat warga lain.

“Jika ditemukan penimbunan atau penyelewengan BBM, akan kami tindak sesuai ketentuan hukum,” tegas Rulian, Senin (19/10/2026). ● (Egi)



KPK Geledah 8 Lokasi terkait Kasus Korupsi BNPB, Sita Uang hingga Perhiasan

BANJARMASIN |
Harian Merdeka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ada delapan lokasi yang sudah digeledah oleh tim penyidik sejak Kamis (15/10/2026) hingga Senin (19/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan delapan lokasi tersebut meliputi rumah hingga perkantoran, serta lokasi lain di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.

“Objek-objek penggeledahannya yaitu di rumah, perkantoran, serta lokasi lainnya yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi,” kata

Budi dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

“Termasuk Kantor BNPB yang beralamat di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, yang dilakukan penggeledahan pada hari Kamis (15/10),” tambahnya.

Dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi tersebut, kata Budi, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan korupsi dana kebencanaan. Termasuk tiga unit mobil.

“Penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta 3 unit mobil yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini,” ungkap Budi.

Budi menambahkan bahwa tim penyidik selanjutnya bakal menelaah, menganalisis, dan memverifikasi sederet barang

bukti yang ditemukan.

“Selanjutnya Penyidik akan melakukan analisis dan meminta keterangan dari para pihak guna menerangkan barang-barang yang telah disita tersebut,” pungkasnya.

KPK juga mengamankan barang bukti dengan nilai total sekitar Rp 5,47 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Barang bukti itu terdiri atas uang dalam mata uang asing, uang tunai rupiah, emas, tabungan emas, dan aset kripto.

Rinciannya meliputi uang senilai USD 7.500 dan SGD 9.000, uang tunai Rp 3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat 133 gram senilai Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,10 miliar.

● (Egi)

Dudung Tegaskan Prabowo Minta Kasus Dugaan Korupsi BNPB Diproses Hukum



JAKARTA |
Harian Merdeka

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menegaskan Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak

hukum menindak tegas setiap dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dudung mengatakan, Presiden tidak memberikan toleransi terhadap tindak pidana korupsi. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara objektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Bapak Presiden tegas-tegas kalau memang terjadi ada penyimpangan, maka dilakukan proses hukum, ya, dengan aturan hukum yang sebenar-benarnya,” ujar Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa perkara yang tengah diselidiki di BNPB tidak serta-merta berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut memiliki konstruksi perkara tersendiri dan melibatkan faktor-faktor lain yang sedang diidentifikasi.

“Kemudian yang kedua, masalah di BNPB, itu tidak serta-merta masalah-masalah kebencanaan yang kaitannya dengan karhutla ini, tetapi banyak faktor-faktor lain yang kemudian akhirnya teridentifikasi,” imbuh mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan untuk periode 2024–2026.

Nilai proyek yang menjadi objek perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp148 miliar. Dugaan korupsi itu menjadi sorotan karena berkaitan dengan pengadaan yang menggunakan anggaran untuk kebutuhan penanggulangan bencana.

Dalam perkembangan penanganan perkara, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka termasuk Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB yang disebut merupakan adik kandung mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Suharyanto, serta tenaga ahli bernama Richard Erlangga. ● (hmi)



RIA RICIS : KARHUTLA ITU NYATA

JAKARTA |
Harian Merdeka

Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda berbagai kawasan di Tanah Air memicu sorotan dari kreator konten Ria Ricis.

Mantan istri Teuku Ryan itu mengungkapkan fakta lapangan yang sempat ia saksikan secara langsung ketika mengunjungi Kepulauan Maluku beberapa waktu lalu.

"Kemarin waktu aku trip ke Maluku, aku pernah posting videonya juga di Insta Story, ada beberapa juga hutan yang memang dibakar dan memang kelihatan kok

ada yang jagain juga, dan itu memang jelas dan aku juga sempat ngerekam," kata Ria Ricis di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kemarin.

Menyaksikan sendiri aksi pembakaran lahan tersebut membuat adik pendakwah Oki Setiana Dewi itu menekankan kerusakan ekosistem dan ancaman polusi udara dinilainya benar-benar nyata menghantam kehidupan warga di sekitarnya.

"Jadi memang untuk teman-teman di luar sana karhutla itu memang nyata adanya, memang benar adanya, bukan, bukan semata-mata postingan sosial media

doang, enggak. Dan memang itu nyata," tegasnya.

Situasi di daerah terdampak kebakaran kian pelik akibat kemarau panjang tanpa curah hujan selama berbulan-bulan. Menyadari beratnya perjuangan para korban di titik-titik krisis, Ria Ricis mengajak masyarakat untuk segera meng

girimkan sokongan dana maupun kebutuhan pokok.

"Kita bisa sama-sama bantu banyak-banyak berdoa,

kirim banyak bantuan, dan semoga hujan cepat turun, kita harus banyak-banyak berdoa dan kirimkan bantuan sebisa dan semampu kita," tuturnya.

Kekhawatiran ibu satu anak itu semakin bertambah seiring kabar berembusnya kabut asap kiriman menuju Jakarta. Penurunan kualitas udara perkotaan dinilainya berpotensi memperburuk kesehatan kelompok rentan maupun anak-anak.

"Kalau khawatir, jelas khawatir banget. Tentu bukan cuman kita doang yang khawatir, pasti teman-teman di luar sana juga," pungkasnya. ● (dth)



Kapolda Sulteng Temui Ketua DPRD: Bahas Pos Kamling, Penanganan Demo, Hingga BBM

PALU | **Harian Merdeka**

Kapolda Irjen Pol Rizal Irawan membahas pembentukan pos keamanan lingkungan (pos kamling) bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, sebagai salah satu upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pembahasan tersebut, berlangsung dalam kunjungan silaturahmi di Kota Palu, Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan itu, juga membahas sejumlah persoalan keamanan, mulai dari pemberantasan narkoba, penanganan aksi demonstrasi, hingga dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM).

Dalam kunjungan tersebut, Rizal didampingi Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Semmy Ronny Thaaba, Irwasda Kombes Pol Purwanto Puji Sutan, Dirintelkam Kombes Pol Andi Aditya Sakti, dan Ka SPN Kombes Pol Seminar Sebayang.

Pembentukan pos kamling dibahas, sebagai langkah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

Keberadaan pos kamling diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif warga, dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat hubungan antara



kepolisian dan masyarakat.

Selain itu, Kapolda Sulawesi Tengah menyampaikan konsep Polisi Bersama Masyarakat sebagai upaya memperlancar kedekatan antara kepolisian dan warga.

Pendekatan tersebut, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Persoalan narkoba juga menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut. Dukungan DPRD dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba yang dapat mengancam keamanan dan masa

depan masyarakat.

Kapolda dan Ketua DPRD turut membahas penanganan aksi demonstrasi yang membawa berbagai isu nasional maupun regional. Koordinasi antarlem-
baga diperlukan agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung tertib dan aman, dengan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Tak hanya itu, dugaan penyelewengan BBM juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Sinergi berbagai pihak diharapkan dapat mendukung pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan BBM.

Kabidhumas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, kunjungan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan DPRD dalam menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah.

“Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang baik ini terus terjaga sehingga berbagai persoalan kamtibmas dapat ditangani bersama. Dukungan seluruh elemen masyarakat juga sangat penting untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif,” tandasnya.

● (Egi)

Iklan Mini Merdeka
Pasang Iklannya Disini...!

Telp/Fax : (021) 59728637 | harianmerdekaredaksi@gmail.com

Properti

Otomotif

Lowongan Kerja

Jasa & Servis

Jual Beli

Lain-lain

LOWONGAN KERJA
• Staff Administrasi
• Sales Marketing
• Kurir / Driver
• Operator Produksi
Kualifikasi :
• Pria/Wanita
• Usia 18 - 35 tahun
• Pendidikan min. SMA/SMK
• Disiplin & Bertanggung Jawab

APARTEMEN DIJUAL / DISEWAKAN
• Lokasi Premium
• Fasilitas Lengkap
• Keamanan 24 Jam
• Dekat Pusat Kota
Harga Mulai Rp 450 Juta

RUMAH DIJUAL
SIAP HUNI • LOKASI STRATEGIS
• LT 90 m² | LB 70 m²
• 2 Kamar Tidur
• 1 Kamar Mandi
• SHM • Akses Kendaraan
Harga Rp 650 Juta (Negotiable)

RUMAH DISEWAKAN
• 3 Kamar Tidur
• 2 Kamar Mandi
• Ruang Tamu & Dapur
• Lingkungan Aman & Nyaman
• Area Kallidewa - Jakarta Barat
Rp 45 Juta/Tahun

TANAH/KAVLING DIJUAL
• Luas mulai 100 - 500 m²
• Akses jalan lebar
• Lokasi strategis
• SHM / Sertifikat
Harga Mulai Rp 3,5 Juta/m²

RUKO DIJUAL
COCOK UNTUK USAHA
• LT 80 m² | LB 160 m²
• 2 Lantai
• Lokasi ramai
• Akses mudah
Rp 1,8 Miliar (Negotiable)

APARTEMEN DIJUAL / DISEWAKAN
• Lokasi Premium
• Fasilitas Lengkap
• Keamanan 24 Jam
• Dekat Pusat Kota
Harga Mulai Rp 450 Juta

MOBIL BEKAS BERKUALITAS
Toyota Avanza 2022
• Automatic
• Kondisi istimewa
• Pajak hidup
• Siap Pakai
Rp 185 Juta

MOTOR BEKAS TERPERCAYA
Honda Beat 2023
• Surat Lengkap
• Kondisi Mulus
• Pajak hidup
• Siap Pakai
Rp 16,5 Juta

DEALER MOBIL BARU & BEKAS
• Cash & Kredit
• Proses Cepat
• DP Ringan
• Banyak Pilihan Unit
TUKAR TAMBAH

BENGKEL MOBIL
SERVIS • SPAREPART • TUNE UP
• Ganti Oli
• Tune Up
• Rem
• AC Mobil
• Kelistrikan
SERVIS CEPAT & BERGARANSI

SPAREPART & AKSESORIS MOBIL - MOTOR
• Suku Cadang Original & Aftermarket
• Harga Terbaik
• Tersedia Berbagai Merek

AYO SHOLAT JUM'AT
DI MASJID JAMI' AL IKHLAS
MASJID TRANSIT 24 JAM
Test-uka untuk Umrah
• MAKAN NASI KEBULI MAKLUBAH GRATIS
• 150 PORSI
• SETELAH SHOLAT JUM'AT
• Porsi kenyang
• Bantah benang
• Cami garing
• Masi masuk Syurga
• Nasi Kibuli Maklubah
• Lokasi Strategis
• Dekat Bandara Internasional
• SOLOKANO HATTA
• Jl. Radin Peninggalan No. 23E
• Kecamatan Waru, Kec. Bendo,
• Kabupaten Waru, Jember
• 0821-1113-1236
• 0878-1764-8552
• DONASI INFAQ
• QR Code
• Setor Donasi Anda
• Melalui Arah Jember
• untuk Kemakmuran Masjid

Massa Aksi Karhutla Kuasai Kantor Gubernur Kalteng, Desak Tetapkan Bencana Nasional

PALANGKA RAYA |
Harian Merdeka

Gelombang protes menuntut penetapan status bencana nasional atas krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Gubernur Kalteng (Kalimantan Tengah), Jalan RTA Milono Kota Palangka Raya, berujung ketegangan pada Senin (19/10/2026).

Setelah diwarnai aksi saling dorong dengan pihak pengamanan, ratusan massa akhirnya menembus barikade dan menguasai halaman kantor usai Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, tak kunjung kembali menemui demonstran setelah masuk ke dalam gedung.

Aksi yang digalang Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan gabungan BEM si-Kerakyatan Kalteng serta BEM Universitas Indonesia (BEM UI) yang terbang dari Jakarta semula berlangsung dramatis namun tertib.

Setelah massa berorasi menyuarakan desakan atas krisis kabut asap beracun yang telah berlangsung empat bulan, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran sempat keluar gedung dan menemui para demonstran.

Agustiar bahkan duduk lesehan bersama massa di tengah riuhnya penyampaian aspirasi.

Namun, di tengah jalannya dialog dan orasi massa, azan Asar berkumandang. Agustiar kemudian pamit meninggalkan kerumunan untuk masuk ke dalam gedung kantor gubernur guna menyempurnakan ibadah shalat.

Petaka komunikasi terjadi setelahnya. Usai waktu shalat berlalu, Agustiar tak kunjung muncul kembali ke hadapan publik.

“Massa aksi tetap beribadah di tengah demonstrasi, kita tetap menghormati ibadah. Namun sayangnya, beliau memilih shalat di ruangan ber-AC dan setelah itu tidak mau lagi keluar menemui massa aksi sampai detik ini,” ujar juru bicara aksi, Naomi Simamora.

Krisis Empat Bulan dan Desakan Bencana Nasional

Eskalasi di lapangan ini merupakan akumulasi dari kejenuhan masyarakat atas bencana ekologis karhutla. Indeks polusi udara di Kalteng dilaporkan sempat menembus angka ekstrem di atas 4.000, yang dinilai berada dalam tingkat mematikan bagi



kesehatan.

Menurut Naomi, tuntutan paling krusial dari sembilan poin yang disodorkan aliansi adalah mendesak Gubernur Kalteng menggunakan otoritasnya untuk menekan pemerintah pusat menetapkan karhutla Kalteng sebagai Bencana Nasional.

“Korban jiwa sudah ada, penderita ISPA mencapai ratusan ribu, dan efek dominonya sangat panjang tanpa jaminan kesehatan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 261 Tahun 2006, tiga

indikator utama penetapan bencana nasional sebenarnya sudah terpenuhi,” tegas Naomi.

Selain isu ekologi daerah, aksi jilid ketiga ini juga diwarnai kritik keras terhadap kepemimpinan nasional menjelang momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober esok.

Massa menilai pemerintah gagap merespons krisis kemanusiaan di daerah akibat terjebak dalam dinamika ‘politik kartel dan praktis’. ● (Egi)

Gandeng Ojol Jaga Kamtibmas, Kapolresta Surakarta Gelar ‘Ngariung Aman’



SURAKARTA | **Harian Merdeka**

Suasana penuh keakraban dan gelak tawa mewarnai pertemuan Kapolresta Surakarta AKBP Condro Sasongko dengan para pengemudi ojek online (ojol) di Posko Ojol Simpang Faroka, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Senin (19/10/2026).

Pertemuan yang dikemas me-

lalui kegiatan bertajuk Ngariung Aman itu berlangsung santai dan jauh dari kesan formal. Tak hanya berdialog, Kapolresta yang dikenal jenaka di media sosial dengan sapaan akrab ‘Mbah Con’ juga melontarkan sejumlah guyonan yang membuat suasana semakin cair.

Canda tawa pun pecah di tengah perbincangan. Para driver ojol terlihat membaur bersama orang nomor satu di jajaran Polresta Surakarta tersebut. Tak tampak sekat antara polisi dan masyarakat, melainkan suasana hangat layaknya pertemuan sebuah keluarga.

Dengan gaya komunikasinya yang santai dan penuh humor,

Mbah Con berusaha membangun kedekatan sekaligus mendengarkan langsung berbagai aspirasi para pengemudi ojol yang sehari-hari beraktivitas di jalanan Kota Solo.

Kapolresta Surakarta AKBP Condro Sasongko mengatakan, kegiatan Ngariung Aman merupakan salah satu upaya kepolisian untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.

“Polisi dan masyarakat itu harus dekat. Jangan sampai ada jarak. Kita bisa ngobrol santai, bercanda, bahkan saling mengingatkan. Karena menjaga keamanan Kota Solo bukan hanya tugas polisi, tetapi tang-

gung jawab kita bersama,” ujar AKBP Condro.

Menurutnya, para pengemudi ojol memiliki peran penting dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mengingat mobilitas mereka yang tinggi dan hampir setiap hari bersentuhan langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat.

“Teman-teman ojol ini setiap hari berada di jalan. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan atau membutuhkan kehadiran polisi, jangan sungkan untuk menyampaikan. Kita ingin Solo tetap aman, nyaman, dan masyarakat bisa mencari rezeki dengan tenang,” katanya. ● (Egi)

Kapolri Temui Panglima TNI, Bahas Tambang Ilegal dan Narkoba

CILANGKAP |
Harian Merdeka

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan kunjungan silaturahmi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta jajaran Kepala Staf lintas matra di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin, 19 Oktober 2026.

Pertemuan ini membahas penguatan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan menghadapi berbagai ancaman kejahatan.

“Kita ini merupakan keluarga besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Karena itu, soliditas dan sinergi TNI-Polri harus terus dipelihara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Suyudi.

Di hadapan Panglima, Kapolri turut menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pertambangan ilegal, peredaran narkoba, hingga kejahatan transnasional yang memanfaatkan berbagai jalur penyelundupan.

Menurut Suyudi, penanganan ancaman tersebut membutuhkan langkah terpadu dan penegakan hukum yang konsisten.

Salah satu contohnya saat ini, yaitu terkait perkembangan modus peredaran narkoba, termasuk penyalahgunaan rokok elektrik atau vape untuk mengedarkan narkoba cair.

Atas dasar ini, Kapolri mengajak Panglima TNI untuk menekankan pentingnya me-



nindak tegas siapa pun yang terlibat atau melindungi jaringan peredaran narkoba, termasuk oknum aparat.

“Peredaran narkoba terus berkembang dengan berbagai modus dan jalur penyelundupan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang membekingi kejahatan tersebut,” tegasnya.

Selain narkoba, pemberantasan pertambangan ilegal juga menjadi perhatian melalui pembentukan satgas terpadu TNI-Polri. Lalu, di bidang keamanan digital, Kapolri menyoroti ancaman serangan siber dan penyalahgunaan identitas di ruang digital.

“Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Penguatan keamanan siber dan sistem identitas digital menjadi

bagian penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” lanjut Suyudi.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko, serta jajaran pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri. ● (Egi)

POLRI MULAI SERIUS USUT 98

Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

“Jadi dari 98 LP yang naik sidik, terkait dengan korporasi yang saat ini sedang berjalan, yang sedang berproses ke tingkat penyidikan, itu ada

98 kasus terkait korporasi,” demikian disampaikan Suyudi.

Kapolri mengatakan penyidik masih mendalami perkara dengan mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Penetapan tersangka ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan

para tersangka,” ujarnya.

Suyudi menegaskan, pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum tidak hanya perusahaan, tetapi juga pemilik dan pemegang saham yang bertanggung jawab atas korporasi terkait karhutla.

Selain mengusut tanggung jawab korporasi, Polri juga mendalami dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus kar-

hutla tersebut.

Suyudi mengonfirmasi adanya pihak asing, termasuk dari negara tetangga, yang keterlibatannya masih ditelusuri dalam proses penyidikan.

“Kita dalam ini ada keterlibatan pihak asing. Ya, ada keterlibatan pihak asing. Ya, namun karena ini kita masih dalam proses penyidikan,” pungkasnya. ● (Egi)

FRENCH OPEN 2026: LEO/DANIEL COMEBACK

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Indonesia mengirim 14 wakil ke French Open 2026. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan kembali bertanding setelah sempat absen di Denmark Open 2026.

French Open 2026 akan digelar di Arena Grand Paris pada 20-25 Oktober 2026. Ini merupakan turnamen level Super 750.

Ganda putra menjadi sektor dengan wakil terbanyak yakni lima pasangan. Leo/Daniel menjadi salah satunya.

Peraih medali

emas

Asian

Games 2026

itu sempat absen

di Denmark Open

2026 karena Daniel

mengalami cedera siku.

Di French Open 2026, Leo/

Daniel akan memainkan

babak pertama pada Selasa

(20/10/2026) melawan wakil

Chinese Taipei, Fang-Chih

Lee/Fang-Jen Lee.

Sementara itu, tunggal putra dan ganda putri masing-masing punya tiga wakil di French Open 2026. Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan Moh Zaki

Ubaidillah akan jadi harapan Indonesia di nomor tunggal putra.

Ganda campuran diwakili oleh Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Keduanya akan mencoba bangkit usai tersingkir awal di Denmark Open 2026 pekan lalu. ● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**